



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN  
MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dimungkinkan penyusunannya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mendapatkan izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
2025

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

KETERANGAN:

<b>WARNA ABU-ABU</b>	TARGET PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
<b>WARNA HIJAU</b>	TARGET PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Desa Pesisir Bersih	a. persyaratan, pengusulan, dan penetapan lokasi; b. pengelolaan sampah berkelanjutan; dan c. pendanaan.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	a. penetapan desa wisata bahari; b. pengaturan mekanisme													a. penyederhanaan proses penetapan desa wisata bahari, dengan mengurangi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari	bantuan untuk pelabuhan perikanan; c. penguatan pemberdayaan masyarakat pesisir; d. fasilitasi sarana dan prasarana wisata bahari; e. penguatan kemitraan dengan sektor swasta; dan f. pengembangan infrastruktur digital dan promosi wisata bahari.													tahapan verifikasi administrasi dan survei lokasi yang dilakukan oleh tim kerja; b. penghapusan kewajiban penetapan desa wisata bahari di pelabuhan perikanan yang telah memiliki fungsi pengusahaan wisata bahari seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; c. pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan keterlibatan nelayan dan pembudidaya ikan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi;	penetapan kategori kawasan: a. penetapan zona; b. batas koordinat; dan c. peta.													Kumulatif terbuka tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
4.	Keputusan Menteri	Status Perlindungan Jenis Ikan;	penetapan jenis ikan yang terancam punah													Kumulatif terbuka Tindak lanjut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMENKP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

## 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan													Tindak lanjut Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
2.	Keputusan Menteri	Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	Menetapkan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan													Tindak lanjut Pasal 226 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.	Keputusan Menteri	Penetapan/ Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan	Menetapkan/ meningkatkan kelas pelabuhan perikanan													Tindak lanjut Pasal 211 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

### 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan	1. Menambahkan bentuk pembinaan; dan 2. Perubahan mekanisme CPPIB.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara	1. Menyesuaikan dengan pengaturan neraca komoditas; 2. Penambahan penjelasan pada lampiran untuk													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit ikan; dan 3. Perubahan persyaratan permohonan.													

#### 4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Pemberdayaan UMKM; b. Kriteria UMKM; c. Klasifikasi Kelas Usaha; d. Penilaian kelas usaha UMKM; e. Penetapan kelas usaha; f. Kegiatan pembinaan; g. Sumber Pendanaan; dan													



NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.													
2.	Peraturan Menteri	Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan	a. Pelaksanaan perlindungan Indikasi geografis Produk Kelautan dan Perikanan; b. Pemberian kemudahan; c. Pembinaan; dan d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.													

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> Tahun 2025-2029	Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> , yang selanjutnya disebut RAN IUUF Tahun 2025-2029													

## 6. Inspektorat Jenderal

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													-
2.	Keputusan Menteri	-	-													-

## 7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1. Ketentuan Umum; 2. Mekanisme Kerja Penyuluh Perikanan; 3. Program Penyuluhan; 4. Percontohan Penyuluhan; 5. Metode Penyuluhan; 6. Materi Penyuluhan; 7. Advokasi dan Perlindungan Hukum; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Peralihan; dan 10. Ketentuan Penutup.													a. beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kegiatan penyuluhan perikanan; b. amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Huruf Y disebutkan bahwa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat; c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																<p>perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha; dan</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2.	Peraturan Menteri	Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia	Mengatur kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi													Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3.	Peraturan Menteri	Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan 2025-2029	1. peta kompetensi sektor Kelautan dan Perikanan; 2. Program prioritas penyusunan SKKNI berdasarkan skala prioritas; 3. konektivitas dengan proses bisnin kelautan; 4. kondisi saat ini; 5. kondisi yang diharapkan; dan													a. upaya strategis pemutahiran program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kompeten,

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			6. usulan Rencana Induk Pengembangan SKKNI sektor KP.													<p>professional di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan standar kompetensi kerja;</p> <p>b. untuk keseragaman pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia diperlukan perencanaan pengembangan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia bidang kelautan dan perikanan; dan</p> <p>c. Pemetaan kompetensi disetiap sektor atau kategori lapangan usaha untuk mengidentifikasi dan memetakan unit unit kompetensi dari suatu sektor atau kategori lapangan usaha yang perlu disusun sebagai prioritas penyusunan dan</p>

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																pengembangan SKKNI tahun 2024-2029.
4.	Keputusan Menteri	Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan	Mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan													telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

8. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penanganan Ikan yang Baik	1. persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan; 2. layanan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 3. monitoring, evaluasi, dan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			surveilan; dan 4. pembinaan dan pelaporan.													
2.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP	1. Persyaratan <i>Good Hygiene Practices</i> /GHP; 2. Persyaratan Penerapan PMMT/HACCP; 3. Pembinaan Penerapan Persyaratan <i>Good Hygiene Practices</i> /GHP dan PMMT/HACCP; 4. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; 5. Pelaporan; 6. Perpanjangan dan Perubahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP;													



NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			7. Pengawasan; dan 8. Pemantauan dan evaluasi.													
3.	Peraturan Menteri	Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Negara Republik Indonesia	1. persyaratan pemasukan hasil perikanan; 2. Tata Cara/ proses bisnis/ mekanisme pengendalian mutu dan keamanan pemasukan hasil perikanan (impor murni, <i>re-impor</i> ): <i>Pre-Border</i> (penilaian risiko), <i>Border</i> (koordinasi), <i>Post Border</i> ( <i>sampling &amp; testing</i> ); dan 3. monitoring pemasukan hasil perikanan ( <i>wholesaler</i> (UPI), <i>retailer</i> (pasar).													

9. Biro Perencanaan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<div>1. Dasar Pelimpahan Urusan;</div> <div>2. Karakteristik urusan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan;</div> <div>3. Nama program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi;</div> <div>4. Nama program dan kegiatan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Tugas Pembantuan;</div> <div>5. Penetapan dan Persyaratan pejabat pengelola anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan</div> <div>6. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dan mekanisme</div>													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			laporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.													
2.	Peraturan Menteri	Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	Visi dan Misi, Analisis Situasi, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran Strategis, kebijakan dan Program, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Perencanaan anggaran untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 s.d. 2029													
3.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja) Tahun 2026	1. Arah kebijakan, sasaran strategi, program (sasaran program, indikator sasaran program, output program, dan indikator output program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta terkait dukungan terhadap													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			prioritas nasional, major project, kegiatan tematik, dan terobosan KKP tahun 2026; 2. matriks Renja KKP Tahun 2026; dan 3. rincian komponen kegiatan utama dan dukungan pada terobosan KKP tahun 2026.													
4.	Keputusan Menteri	Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Menetapkan indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025													

10. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penyaluran Dana Bergulir Bidang Kelautan dan Perikanan	Mengatur tentang ketentuan penyaluran dana bergulir yang sesuai dengan pola penyaluran dan prosedur yang													Pelaksanaan tindak lanjut temuan dari BPK

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			ditetapkan dimulai dari pendampingan, pengajuan proposal pinjaman, pendampingan, penilaian kelayakan, jaminan pembiayaan, mitigasi resiko, dokumen perjanjian, pengembalian pinjaman, penagihan pengembalian dan pelunasan, serta monitoring dan pelaporan													

#### 11. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di	1. Ketentuan umum; 2. Tunjangan kinerja; 3. Tata cara pembayaran tunjangan kinerja; 4. Penambahan dan pengurangan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	5. Ketentuan tunjangan kinerja; peralihan; dan 6. Ketentuan penutup.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian JPT dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Ketentuan umum; 2. Persyaratan dan tata cara penunjukan; 3. Kewenangan; 4. Surat perintah; 5. Masa berlaku; 6. Tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja; dan 7. Ketentuan penutup.													

## 12. Biro Hukum

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan	Menetapkan program penyusunan peraturan Menteri													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026	dan Keputusan Menteri di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2026													

### 13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029													

### 14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42	Menambahkan materi muatan naskah dinas Wakil Menteri Kelautan dan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perikanan													

15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Nama layanan publik dan produk layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyempurnaan nama layanan publik dan produk layanan publik													Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana